



Analisis Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Andriani Puspitaningsih

Universitas Halu Oleo

Korespondensi penulis: andrianipuspitaningsih@uho.ac.id

Teguh Permana

Universitas Halu Oleo

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari

Abstract. *The aim of this research is to classify regencies and cities in Southeast Sulawesi province based on poverty indicators. The method used is descriptive quantitative using cluster analysis with SPSS software. The data used is secondary data originating from BPS in the form of cross-sectional data for 2022 which consists of the poverty depth index, the percentage of poor people and the poverty severity index. Based on the results of the analysis, poverty at the district and city levels in the province of Southeast Sulawesi is divided into 3 groups. Group 1 consists of the city of Kendari and the city of Bau-Bau. Group 2 consists of Buton Regency, Muna Regency, Kolaka Regency, South Konawe Regency, Bombana Regency, Wakatobi Regency, East Kolaka Regency, West Muna Regency, Central Buton Regency and South Buton Regency. Group 3 consists of Konawe Regency, North Kolaka Regency, North Buton Regency, North Konawe Regency and Konawe Archipelago Regency. Based on cluster analysis, regencies and cities that have the highest poverty are in group 3, moderate poverty is in group 2 and the lowest poverty is in group 1*

Keywords: *Poverty, Poverty severity index, Poverty depth index*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi tenggara berdasarkan indikator kemiskinan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan analisis cluster dengan software SPSS. Data yang digunakan data sekunder yang berasal dari BPS berupa data cross section tahun 2022 yang terdiri dari indeks kedalaman kemiskinan, persentase penduduk miskin dan indeks keparahan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis bahwa kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi tenggara dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri atas kota kendari dan kota bau-bau. Kelompok 2 terdiri atas kabupaten buton, kabupaten muna, kabupaten kolaka, kabupaten konawe selatan, kabupaten bombana, kabupaten wakatobi, kabupaten kolaka timur, kabupaten muna barat, kabupaten buton tengah dan kabupaten buton selatan. Kelompok 3 terdiri atas kabupaten konawe, kabupaten kolaka utara, kabupaten buton utara, kabupaten konawe utara dan kabupaten konawe kepulauan. Berdasarkan analisis cluster bahwa kabupaten dan kota yang memiliki kemiskinan tertinggi terdapat pada kelompok 3, kemiskinan sedang pada kelompok 2 dan kemiskinan terendah pada kelompok 1

Kata kunci: kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan

LATAR BELAKANG

Perubahan era saat ini yang disebut dengan era disrupsi ini pun menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pencapaian tujuan pertama dari *Sustainable Goals Developments* (SDGs) dimana pada tahun 2030 sudah tidak ada lagi kemiskinan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keberadaan TIK dapat menjadi faktor penting dalam pencapaian SDGs. Perkembangan TIK akan mendorong pencapaian SDGs karena TIK akan mampu mengubah masyarakat, pemerintah, industri, institusi dan juga organisasi selain itu teknologi akan selalu berkembang dan memunculkan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan manusia (Sachs, et al., 2016 dalam Azzasyofia, 2022).

Masalah kemiskinan, masih menjadi kajian yang tidak selesai. Kebijakan pengurangan kemiskinan baik yang dirumuskan di tingkat global, mulai dari kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) sampai tahun 2015 dan dilanjutkan kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) sampai sekarang ini, belum memberi efek positif penurunan angka kemiskinan di peringkat global (Latief, 2022).

Konsep SDGs lahir pada kegiatan Koferenesi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim (Harahap, 2022).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwasanya setiap daerah sudah harus mulai mengimplementasikan program SDGs guna tercapainya tujuan di tahun 2030 nanti serta menyesuaikan dengan RPJMN yang dibuat oleh pemerintah pusat (Dzulqarnain, 2022).

Konsep dari pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya yang di miliki oleh manusia dalam melakukan perbaikan mutu kehidupan serta tidak melampaui batas ekosistem lingkungan yang mendukung kelangsungan kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat

sebagai program dalam mengentaskan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta aspirasinya (Surya, 2019 dalam Normasyhuri, 2022).

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dari program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah di seluruh dunia menetapkan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan dan merumuskan beragam strategi kebijakan (Kwon & Kim, 2014; Sumner & Tiwari, 2011). Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah menghambat laju penurunan kemiskinan secara global (Han et al., 2020; Hossain, 2021; Kumar & Pinky, 2021) (Noorikhshan, 2022).

Keadaan ini semakin diperparah dengan kondisi dua tahun belakangan ini yang disebabkan oleh penyebaran dari Wabah *Virus Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), yang semakin menyulitkan tingkat perekonomian masyarakat (Nabilla, 2022).

Sulawesi tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia tengah dalam pembangunan, yang terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Tentu ada dampak dari pandemi terhadap kemiskinan di provinsi ini. Oleh karenanya penulis ingin melihat bagaimana kemiskinan di kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi tenggara.

KAJIAN TEORITIS

Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi di bawahnya. Model seperti ini mendasarkan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran. Permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya mekanisme *trickle down effects*, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi kapital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata. Namun demikian yang terjadi justru sebaliknya, yaitu tetesan dorongan atau pemerataan ke bawah tidak terjadi, mungkin sejak awal aturan dari pemerintah tidak jelas dan juga egoistik konglomerasi akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan pembagian pendapatan dari pembangunan itu sendiri (Prawoto, 2008).

Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri (Priseptian, 2022).

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Kadji, 2012).

Dalam buku Todaro menyatakan bahwa pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, angka kematian bayi yang tinggi, angka harapan hidup yang relatif singkat, peluang untuk mendapatkan kesejahteraan rendah serta pendidikan yang rendah adalah faktor penyebab kemiskinan (Pasaribu, 2022).

Kemiskinan daerah sebagian besar merupakan hasil agregasi dari kemiskinan pedesaan (Wahyudi, 2022). Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah (Ramadhan, 2022). Kemiskinan menjadi salah satu faktor untuk melihat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Salah satu indikator untuk melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah dengan nilai persentase kemiskinan (Agung, 2022).

Lingkaran setan kemiskinan yang dicetuskan oleh Ragner Nurkse tahun 1953 merupakan keadaan yang menjadi penyebab timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi di suatu daerah (Macmud, 2022 dalam Amami, 2022).

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik

yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (Nasikun dalam Suryawati, 2005).

Kebijakan desentralisasi fiskal ini pula sampai pada tingkat kabupaten serta kota bahkan hingga ketingkat desa. semenjak penetapannya, kebijakan ini telah menghadirkan asa baru bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan pengetasan kemiskinan bagi masyarakat (Daforsa & Handra, 2019 dalam Adriawan, 2022).

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrument yang sangat vital dalam mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin (Misdawita & Sari, 2013 dalam purnomo, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan analisis cluster dengan software SPSS. Data yang digunakan data sekunder yang berasal dari BPS berupa data cross section tahun 2022 yang terdiri dari indeks kedalaman kemiskinan (p0), persentase penduduk miskin (p2) dan indeks keparahan kemiskinan (p1).

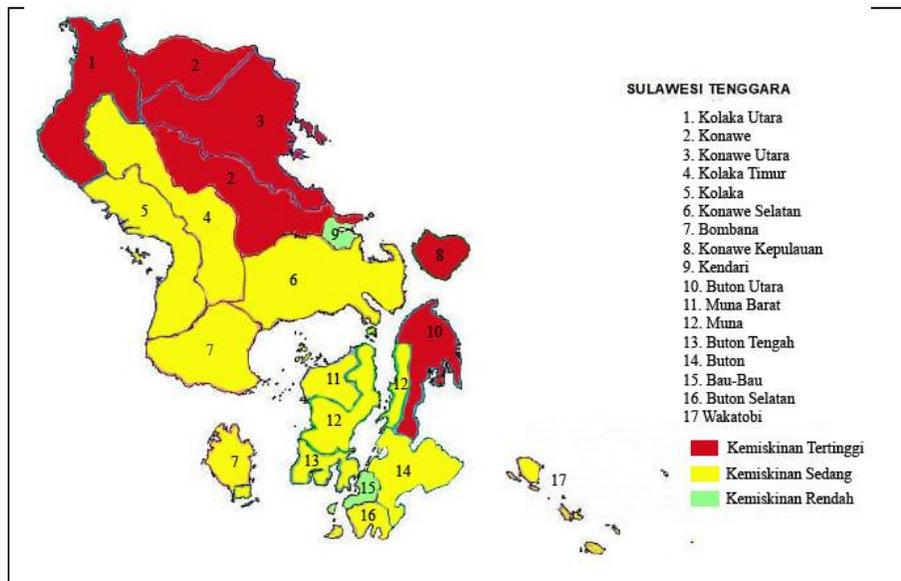
Analisis cluster merupakan metode multivariat yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan obyek berdasarkan kesamaan karakteristik (Hair at all, 2006). Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama (Chen, 2008). Dua metode dalam analisis ini adalah metode hirarkhi dan metode non hirarkhi. Pada penelitian ini menggunakan kombinasi kedua metode. Pertama gunakan metode hirarkhi kemudian dilanjutkan dengan metode non hirarkhi (Ferezagia, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan menjadi salah satu penghambat dalam pertumbuhan ekonomi dan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan. Provinsi Sulawesi tenggara terdiri atas 15 kabupaten dan 2 kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dilihat dari indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan persentase penduduk miskin.

Dari hasil olah data menggunakan SPSS dengan analisis cluster di temukan 3 cluster tingkat kemiskinan yang terdiri atas cluster 1 dengan tingkat kemiskinan rendah, cluster 2 dengan tingkat kemiskinan sedang dan cluster 3 dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Sebaran dari hasil analisis cluster dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Sebaran cluster kemiskinan Sultra

Dari gambar 1 diatas kita dapat melihat bahwa tingkat kemiskinan tinggi berada di utara dan timur yang ditandai dengan warna merah , sedangkan kemiskinan sedang ada di wilayah tengah dan selatan yang ditandai dengan warna kuning. Sedangkan kemiskinan rendah hanya terdapat di kota kendari dan kota bau-bau yang ditandai dengan warna hijau.

Tabel 1. Kota Pada Cluster 1

Kota	P0	P1	P2
Kendari	0.73	0.15	4.57
Bau-Bau	0.80	0.17	7.31

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pada cluster 1 terdiri atas 2 kota yaitu Kota kendari dan kota bau-bau yang memiliki indikator kemiskinan yang rendah, dengan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0.765, rata-rata indeks keparahan kemiskinan sebesar 0.16, rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 5.94%. Kedua kota tersebut merupakan daerah dengan pergerakan perekonomian yang terbilang pesat ketimbang

daerah lainnya yang ada di Sulawesi tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan data yang telah tertera.

Kota kendari merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi tenggara, tentu sebagai ibu kota memiliki kelebihan tersendiri sebab sebagai ibu kota provinsi daerah kota kendari tentu menjadi pusat investasi serta perkembangan dan pembangunan yang dapat memberi dampak perekonomian yang lebih baik, sebab roda pergerakan perekonomian serta laju pembangunan yang merata, serta berbagai macam investasi yang ada di kota kendari menjadikan hampir disetiap kecamatan kota kendari mengalami pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi salah satu daerah di sultra dengan tingkat kemiskinan rendah.

Begitu pula dengan kota bau-bau sebagai salah satu kabupaten penyanggah ibu kota provinsi, dimana banyak sekali dalam rangka pemenuhan kebutuhan berbagai daerah kabupaten lainnya yang ada di sulawesi tenggara menjadikan kota bau-bau menjadi salah satu daerah dengan penyedia berbagai logistik dalam rangka pemenuhan beberapa daerah disulawesi tenggara.

Kota Bau-Bau yang memiliki pelabuhan terbesar kedua setelah kota kendari menjadikan banyak kapal-kapal besar dalam rangka mensupply berbagai kebutuhan logistic dari berbagai daerah kabupaten yang ada di sulawesi tenggara menjadikan kota bau-bau sebagai daerah transit serta daerah pembongkaran berbagai macam logistik yang menjadikannya salah satu daerah dengan pusat perekonomian penyanggah yang sangat berperan penting dalam rangka mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan. Dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kelebihan kedua kota tersebut, menjadikan kota kendari dan kota bau-bau sebagai daerah dengan tipe kemiskinan yang rendah.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada cluster 2 terdiri atas 10 kabupaten yaitu Buton, Muna, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Timur, Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan yang memiliki indikator kemiskinan yang sedang. Dengan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,782, rata-rata indeks keparahan kemiskinan sebesar 0.385, rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 13.081%.

Tabel 2. Kabupaten Pada Cluster 2

Kabupaten	P0	P1	P2
Buton	1.25	0.24	13.27
Muna	1.57	0.30	13.41
Kolaka	1.54	0.31	11.51
Konawe Selatan	2.18	0.57	11.08
Bombana	1.32	0.27	10.26
Wakatobi	2.18	0.46	14.55
Kolaka Timur	1.86	0.46	13.57
Muna Barat	1.99	0.47	13.85
Buton Tengah	1.81	0.34	14.90
Buton Selatan	2.12	0.43	14.41

Sepuluh kabupaten pada tabel 3 tersebut merupakan daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (pertambangan, pertanian dan destinasi wisata laut dan alam yang salah satunya terbaik di dunia), meski dalam pengelolaannya saat ini belum secara inklusif sehingga nilai atau dampak perekonomiannya belum benar-benar memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan serta nilai ekonomi buat masyarakat. Percepatan dan perhatian lebih harus diberikan dan dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga dapat mengoptimalkan kekayaan atau sumber-sumber perekonomian yang ada.

Kebijakan yang tepat tentu dibutuhkan dalam pengelolaan sumber-sumber perekonomian yang ada, sebab jika dalam pengelolaannya belum optimal dan tidak diberi perhatian lebih maka sulit rasanya dapat mengoptimalkan kekayaan yang ada untuk dapat dikelola dan dirasakan oleh masyarakat daerah-daerah tersebut. Ego sektoral harus dikesampingkan dan keseriusan dalam mengoptimalkan kekayaan sumber daya yang ada perlu menjadi perhatian lebih, sebab hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab mengapa sepuluh daerah tersebut masuk pada cluster daerah dengan tingkat kemiskinan yang sedang.

Tabel 3. Kabupaten Pada Cluster 3

Kabupaten	P0	P1	P2
Konawe	2.86	0.85	12.57
Kolaka Utara	2.80	0.82	13.08
Buton Utara	2.66	0.72	14.26
Konawe Utara	2.52	0.69	13.72
Konawe Kepulauan	3.09	0.90	16.15

Pada tabel 3 diatas kita dapat melihat bahwa pada cluster 3 terdiri atas 5 kabupaten yang memiliki indikator kemiskinan tinggi..Dengan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2.786, rata-rata indeks keparahan kemiskinan sebesar 0.796, rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 13.956%

Lima kabupaten dengan kemiskinan tinggi yang ada di Sulawesi tenggara ini diakibatkan lima daerah ini lebih mengandalkan pemenuhan kebutuhannya dari daerah-daerah penyangga,oleh karena itu daerah ini cenderung sulit berkembang seperti kota lainnya yang ada di Sulawesi tenggara. Kurangnya kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada pada daerahnnya sendiri menjadi salah satu penyebab penyumbang mengapa daerah ini mengalami kemiskinan tinggi. Kemampuan yang kurang dan tidak adanya kemandirian dalam pengelolaan sumber daya yang ada menjadikan lima daerah ini masuk dalam kategori kemiskinan tinggi. Olehnya itu perlu evaluasi secara menyeluruh kedepannya, sehingga tercipta pemerataan pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosio cultural. Sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan yang inklusif dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terkhusus disektor ekonomi. Sehingga daerah-daerah ini tidak lagi masuk kedalam cluster dengan indikator kemiskinan yang tinggi,dan dapat berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis bahwa kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri atas kota kendari dan kota bau-bau. Kelompok 2 terdiri atas kabupaten buton, kabupaten muna, kabupaten kolaka, kabupaten konawe selatan, kabupaten bombana, kabupaten wakatobi, kabupaten kolaka timur, kabupaten muna barat, kabupaten buton tengah dan kabupaten buton selatan. Kelompok 3 terdiri atas kabupaten konawe, kabupaten kolaka utara, kabupaten buton utara, kabupaten konawe utara dan kabupaten konawe kepulauan. Berdasarkan analisis cluster bahwa kabupaten dan kota yang memiliki kemiskinan tertinggi terdapat pada kelompok 3, kemiskinan sedang pada kelompok 2 dan kemiskinan terendah pada kelompok 1. Untuk penelitian selanjutnya bisa melihat lebih mendalam lagi terkait determinan kemiskinan di provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk penelitian selanjutnya bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022, January). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. In *Forum Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 226-234). <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10750>
- Agung, A. I., & Budiarti, W. (2022, November). Determinan Kemiskinan di DI Yogyakarta Tahun 2011-2020. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2022, No. 1, pp. 343-352). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1435>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 48-54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Azzasyofia, M. (2022). TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA DISRUPSI. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2982>
- BPS Sulawesi Tenggara, <https://sultra.bps.go.id/>
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 109-116. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2505>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Harahap, A. F., & Pasaribu, N. S. (2022). HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN DENGAN CAPAIAN SDGs DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/bay.v1i1.5780>
- Latief, M. I., Yunus, R., Sultan, H., & Genda, A. (2022). Problematika akselerasi penanganan kemiskinan nelayan di masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1026>
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG*, 1-7. <https://repository.ung.ac.id>
- Nabilla, N., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi Sumatera Barat. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v6i2.13812>
- Noorikhshan, F. F., & Gunawan, H. (2022). Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 133-154. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10324>
- Normasyhuri, K., Suryanto, T., & Prayoga, R. (2022). Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 18(2), 173-185. <https://doi.org/10.31967/relasi.v18i2.589>

- Pasaribu, R., Batubara, M., & Rahmani, N. A. B. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2). <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.6480>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215-220. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68. <http://journal.umy.ac.id>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022, January). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. In *Forum Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 45-53). <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Ramadhan, D., & Desmawan, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(4), 965-975. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i4.3260>
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03). <https://journal.ugm.ac.id/jmpk/>
- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-57. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1423>